



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Biro Hukum dan Organisasi
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reghi Perdana, SH,. LLM
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Utama
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2022

Pihak Kedua

Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

Pihak Pertama

Reghi Perdana, SH,. LLM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Biro Hukum dan Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4.63
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7.43
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	5.71
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.85
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.80
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100
Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.6
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96.26

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4.6
Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87.25
Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2.5
Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95.7

Kegiatan :

Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
Advokasi Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta Layanan
Informasi dan Pengaduan

Anggaran :

Rp.
13,608,599,000.00

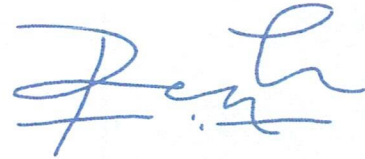
Jakarta, 28 Desember 2022

Pihak Kedua



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

Pihak Pertama



Reghi Perdana, SH., LLM